

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas hasil analisis data yang menjadi tujuan penelitian. Selain itu, bagian pembahasan memuat telaah kritis terhadap penelitian dengan menggunakan perspektif berbagai teori dan kajian penelitian yang relevan. Selanjutnya terkait keterbatasan penelitian merupakan keterbatasan yang terkait dengan metodologi.

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

Sebelum dilakukan uji hipotesis maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai deskripsi data penelitian. Tabel 4 menunjukkan deskripsi data secara umum dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai minimum masing-masing variabel berbeda. Hal ini dikarenakan kode angka pertanyaan di setiap variabel berbeda. Jumlah responden yaitu 26.755 individu. Dalam tabel 4 berikut ini akan dijelaskan deskripsi dari masing-masing variabel yang digunakan beserta penjelasan masing-masing variabel.

Tabel 4. Deskripsi Data Penelitian

Variabel	Responden	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Kemiskinan	26.755	3,1150	0,9934	1	4
Pendidikan	26.755	9,0865	4,3408	0	22
Kesehatan	26.755	0,8481	0,3588	0	1
Akses Internet	26.755	0,3297	0,4701	0	1
Kepemilikan Kendaraan	26.755	0,7727	0,4190	0	1
Ketaatan norma agama	26.755	2,9007	0,6871	1	4
Partisipasi kegiatan masyarakat	26.755	0,0701	0,2553	0	1

Sumber: Data diolah

a. Kemiskinan

Variabel kemiskinan diukur dengan pendapatan yang diterima individu selama satu bulan. Berdasarkan tabel 4 nilai minimum dari variabel kemiskinan yaitu 1 (satu) dan nilai maksimum yaitu 4 (empat). Pendapatan yang diterima setiap individu berbeda berdasarkan dengan jenis pekerjaan.

Tingkat pendapatan yang diterima individu berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari umur individu tersebut. Tabel 5 menunjukkan sebaran rentang umur yang telah dikelompokkan pada berbagai tingkat pendapatan dengan menggunakan kode satu hingga empat. Kode 4 menunjukkan individu yang memiliki pendapatan 0 hingga di bawah Rp 401.220,- (garis kemiskinan menurut BPS). Kode 3 menunjukkan individu yang memiliki pendapatan Rp 401.220,- hingga di bawah Rp 826.500,- (diukur berdasarkan garis kemiskinan menurut world bank yaitu pendapatan perhari \$1,9 yang dikalikan dengan kurs tahun 2018 sebesar Rp 14.500 dikalikan 30 hari. Kode 2 untuk pendapatan Rp 826.500,- hingga di bawah Rp 5.000.000,- sementara kode 1 untuk individu yang mempunyai pendapatan Rp 5.000.000,- keatas. Berikut data sebaran rentang usia berdasarkan tingkat pendapatan yang ditunjukkan tabel 5.

Tabel 5. Distribusi rentang usia berdasarkan tingkat pendapatan

Rentang Usia (tahun)	Pendapatan								Total	
	1		2		3		4			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
19 – 23	17	0,52	799	24,40	316	9,65	2.142	65,42	3.274	12,24
24 – 28	86	2,32	1.299	35,06	363	9,80	1.957	52,82	3.705	13,85
29 – 33	160	3,57	1.752	39,06	431	9,61	2.142	47,76	4.485	16,76
34 – 38	174	4,36	1.519	38,10	450	11,29	1.844	46,25	3.987	14,90
39 – 43	136	4,26	1.227	38,43	369	11,56	1.461	45,76	3.193	11,93
44 – 48	146	5,60	920	35,32	314	12,05	1.225	47,02	2.605	9,74
49 – 53	120	5,41	720	32,46	273	12,31	1.105	49,82	2.218	8,29
54 – 58	96	5,42	439	24,80	194	10,96	1.041	58,81	1.770	6,62
59 – 64	26	1,71	284	18,71	169	11,13	1.039	68,45	1.518	5,67
Total	961	3,59	8.959	33,49	2.879	10,76	13.956	52,16	26.755	100,00

Sumber: Data diolah (2018)

Keterangan:

1 = \geq Rp 5.000.000

2 = Rp 826.500 – <Rp 5.000.000

3 = Rp 401.220 – <Rp 826.500

4 = 0 – <Rp 401.220

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa 52,16% dari total responden mempunyai pendapatan 0 hingga di bawah Rp 401.220,- (hidup di bawah garis kemiskinan menurut BPS). Selain itu, responden yang berjumlah 8.959 atau 33,49% berpendapatan Rp 826.500 hingga kurang dari Rp 5.000.000,-. Urutan setelahnya yaitu 2.879 responden atau 10,76% yang berpendapatan Rp 401.220 hingga kurang dari Rp 826.500,-. Sementara jumlah responden yang mempunyai pendapatan lebih dari atau sama dengan Rp 5.000.000 hanya 961 responden atau 3,59% (merupakan jumlah terkecil). Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut BPS (52,16%) dibandingkan dengan yang hidup di atas garis kemiskinan BPS (47,84%).

Tabel 5 juga menunjukkan sebaran pendapatan di setiap jenjang usia. Pada jenjang usia 19 hingga 23 tahun sebanyak 2.142 responden atau 65,42% berpendapatan 0 hingga Rp 401.220,-. Jenjang usia 24-28 tahun, 54-58 tahun dan 59-64 tahun masing-masing berjumlah 52,82%, 58,81% dan 68,45% yang berpendapatan 0 hingga Rp 401.220,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat jenjang usia tersebut yaitu 19 – 28 tahun dan 54 – 64 tahun lebih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut BPS dibandingkan dengan yang hidup di atas garis kemiskinan BPS. Sementara untuk jenjang usia 29 – 53 tahun hanya 45,76% hingga 49,82% yang hidup di bawah garis kemiskinan BPS. Sisanya (50% lebih) hidup di atas garis kemiskinan BPS.

Selain dilihat dari usia, perbedaan pendapatan juga dapat dilihat menurut jenis kelamin. Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa bersadarkan perbedaan jenis kelamin jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Meskipun jumlah perempuan 53,53% (lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki) namun perempuan berpenghasilan paling banyak pada tingkat pendapatan sebesar 0 – Rp 401.220,- yaitu sebesar 70,70% (di bawah garis kemiskinan menurut BPS). Berbeda dengan laki-laki walaupun jumlah laki-laki hanya 46,47% namun jumlah laki-laki yang mempunyai pendapatan Rp 401.220 ke bawah lebih sedikit yaitu 30,82% dari pada perempuan yaitu 70,70%. Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa pendapatan laki-laki lebih banyak di atas garis kemiskinan menurut BPS atau dikatakan tidak miskin sementara perempuan miskin karena 70,70% hidup di bawah garis kemiskinan. Data jenis kelamin berdasarkan tingkat pendapatan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Distribusi jenis kelamin berdasarkan tingkat pendapatan

Jenis Kelamin	Pendapatan								Total	
	1		2		3		4			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Perempuan (0)	267	1,86	2.684	18,74	1.245	8,69	10.125	70,70	14.321	53,53
Laki-laki (1)	694	5,58	6.274	50,46	1.634	13,14	3.832	30,82	12.434	46,47
Total	961	3,59	8.958	33,48	2.879	10,76	13.957	52,17	26.755	100

Sumber: Data diolah (2018)

Keterangan:

1 = \geq Rp 5.000.000

2 = Rp 826.500 – <Rp 5.000.000

3 = Rp 401.220 – <Rp 826.500

4 = 0 – <Rp 401.220

Distribusi tingkat pendapatan selain dilihat dari tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dikelompokkan berdasarkan individu yang tinggal di kota (urban) dan desa (rural). Tabel 7 menunjukkan bahwa individu yang tinggal di wilayah urban lebih banyak yaitu 15.855 atau 59,26% dan sisanya yaitu 10.900 atau 40,74% tinggal di wilayah rural. Individu yang tinggal di wilayah rural, sebanyak 59% mempunyai pendapatan 0 hingga 401.220,- (di bawah garis kemiskinan BPS) sedangkan sisanya (41%) berpendapatan di atas garis kemiskinan BPS. Untuk wilayah urban sebanyak 47,47% mempunyai pendapatan 0 hingga 401.220,- (di bawah garis kemiskinan menurut BPS) sedangkan sisanya (52,53%) hidup di atas garis kemiskinan. Oleh karena itu dapat disimpulkan

bahwa masyarakat rural lebih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan sedangkan masyarakat urban lebih banyak yang hidup di atas garis kemiskinan.

Selain dilihat dari wilayah tempat tinggal, distribusi tingkat pendapatan dapat dilihat pula dari setiap pulau yang menjadi wilayah penelitian. Berdasarkan tabel 7 dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia di setiap pulau berpendapatan di bawah garis kemiskinan menurut BPS. Masyarakat Pulau Sulawesi yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan menjadi jumlah yang terbanyak dibandingkan pulau yang lain yaitu 58,28% sedangkan sisanya (41,72%) berpenghasilan di atas garis kemiskinan. Pulau kedua dan ketiga setelah Pulau Sulawesi yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan yaitu Pulau Sumatera sebesar 53,28% dan Pulau Jawa 52,39% dan sisanya (46,72% untuk Pulau Sumatera dan 47,61% untuk Pulau Jawa) berpenghasilan di atas garis kemiskinan. Sementara untuk kelompok Pulau Bali, NTB, NTT dan Kalimantan sebesar 49,04% dan 47,78% yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan menurut BPS. Oleh karena itu, ketiga pulau (Sumatera, Jawa dan Sulawesi) lebih banyak yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan masyarakat yang berpenghasilan di atas garis kemiskinan menurut BPS. Sedangkan Pulau Bali, NTB, NTT dan Kalimantan lebih banyak yang berpenghasilan di atas garis kemiskinan. Distribusi wilayah tempat

tinggal (rural-urban dan antar pulau) pada berbagai tingkat pendapatan secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel 7.

Tabel 7. Distribusi wilayah tempat tinggal (rural-urban dan antar pulau) pada berbagai tingkat pendapatan

Wilayah tempat tinggal	Pendapatan								Total	
	1		2		3		4			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Rural	217	1,99	2.943	27,00	1.309	12,01	6.431	59,00	10.900	40,74
Urban	744	4,69	6.015	37,94	1.570	9,90	7.526	47,47	15.855	59,26
Total	961	3,59	8.958	33,48	2.879	10,76	13.957	52,17	26.755	100
Sumatera	231	3,75	2.037	33,07	610	9,90	3.282	53,28	6.160	23,07
Jawa	483	3,33	4.834	33,37	1.580	10,91	7.588	52,39	14.485	54,25
Bali, NTB, NTT	120	3,59	1.162	34,73	423	12,64	1.641	49,04	3.346	12,53
Kalimantan	69	5,03	503	36,64	145	10,56	656	47,78	1.373	5,14
Sulawesi	47	3,52	390	29,21	120	8,99	778	58,28	1.335	5,00
Maluku&Papua	-	0,00	2	100,00	-	0,00	-	0,00	2	0,01
Total	950	3,56	8.928	33,44	2.878	10,78	13.945	52,23	26.701	100

Sumber: Data diolah (2018)

Keterangan:

1 = \geq Rp 5.000.000

2 = Rp 826.500 – <Rp 5.000.000

3 = Rp 401.220 – <Rp 826.500

4 = 0 – <Rp 401.220

Data tingkat pendapatan di Pulau Maluku dan Papua berjumlah 2 untuk tingkat penghasilan Rp 826.500 hingga Rp 5.000.000,-. Data tersebut hanya merupakan jumlah penduduk yang pada tahun 2007 di data pada daerah ILFS namun pada tahun 2014 responden pindah ke Pulau Maluku atau Papua. Sehingga yang tercatat hanya dua responen. Sedangkan penduduk lainnya yang menetap di pulau tersebut berada pada data IFLS khusus untuk daerah Maluku dan Papua.

b. Pendidikan

Distribusi usia berdasarkan jenjang pendidikan baik yang belum ditamatkan atau yang sudah menamatkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 8. Jenjang pendidikan yang telah ditamatkan masyarakat Indonesia paling banyak pada jenjang SMA/sederajat yaitu 7.696 atau 28,8% dari total responden. Hanya 2,6% yang tidak menamatkan SMA/sederajat. Jumlah kedua terbesar lulusan jenjang pendidikan telah ditamatkan yaitu SD/sederajat sejumlah 4.611 individu atau 17,3%. Sedangkan untuk jenjang SD/sederajat yang tidak menamatkan pendidikan sebanyak 3.532 atau 13,2%. Jenjang pendidikan ketiga yang ditamatkan yaitu SMP/sederajat sebanyak 4.065 atau 15,2%. Kemudian sebanyak 3.714 atau 13,9% masyarakat sedang menempuh D3/S1 dan telah menyelesaikan.

Berdasarkan jumlah keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia banyak yang hanya lulusan SMA/sederajat. Sementara jumlah yang melanjutkan keperguruan tinggi masih sedikit yaitu 13,9% persen untuk jenjang D3/S1 dan 0,63% untuk jenjang S2 dan S3. Jumlah tersebut masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah individu yang sedang/telah menamatkan SD/sederajat dan SMA/sederajat. Sementara tuntutan pekerjaan saat ini lebih mengutamakan minimal lulusan SMA/sederajat bahkan ada yang mensyaratkan lulusan perguruan tinggi. Tetapi jumlah lulusan SD/sederajat di Indonesia masih cukup banyak. Oleh karena itu

perlunya kesadaran masyarakat agar menempuh pendidikan yang lebih tinggi (minimal SMA/sederajat) dan merupakan tugas pemerintah untuk mendukung program peningkatan pendidikan supaya kualitas sumber daya manusia dapat meningkat. Distribusi rentang usia berdasarkan jenjang pendidikan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Distribusi rentang usia berdasarkan jenjang pendidikan

Rentang usia (tahun)	Jenjang Pendidikan																Total	
	Tidak sekolah		SD/ sederajat				SMP/ sederajat				SMA/ sederajat				D3/S1		S2/S3	
			TL		L		TL		L		TL		L		TL		L	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
19 – 23	10	0,3	116	3,6	283	8,7	142	4,4	539	16,6	162	5,0	1.317	40,5	684	21,0	2	0,06
24 – 28	31	0,8	188	5,1	463	12,5	154	4,2	672	18,2	110	3,0	1.325	35,9	728	19,7	21	0,57
29 – 33	58	1,3	301	6,7	665	14,8	175	3,9	950	21,2	91	2,0	1.530	34,2	680	15,2	29	0,65
34 – 38	57	1,4	367	9,2	865	21,8	144	3,6	655	16,5	78	2,0	1.235	31,1	551	13,9	23	0,58
39 – 43	73	2,3	350	11,0	763	24,0	151	4,7	500	15,7	82	2,6	901	28,3	341	10,7	21	0,66
44 – 48	172	6,6	419	16,1	493	18,9	82	3,2	303	11,6	64	2,5	734	28,2	306	11,8	30	1,15
49 – 53	269	12,1	681	30,7	405	18,3	76	3,4	182	8,2	37	1,7	337	15,2	210	9,5	20	0,90
54 – 58	241	13,6	611	34,6	358	20,2	75	4,2	150	8,5	29	1,6	168	9,5	120	6,8	16	0,90
59 – 64	231	15,2	499	32,9	316	20,8	73	4,8	114	7,5	33	2,2	149	9,8	94	6,2	7	0,46
Total	1.142	4,3	3.532	13,2	4.611	17,3	1.072	4,0	4.065	15,2	686	2,6	7.696	28,8	3.714	13,9	169	0,63
																		100

Sumber: Data diolah (2018)

Selain distribusi usia berdasarkan tingkat pendidikan, dapat pula dilihat distribusi jenis kelamin berdasarkan jenjang pendidikan di tabel 9. Tabel 9 menunjukkan bahwa perempuan pada jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat lebih banyak yang menamatkan pendidikan dibandingkan laki-laki yaitu 18,52% untuk perempuan di jenjang SD/sederajat dan 16,07% untuk perempuan di jenjang SD/sederajat. Sedangkan di jenjang SMA/sederajat lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan yang menamatkan pendidikan yaitu 31,61%. Sementara pada jenjang D3/S1 lebih banyak perempuan yang menamatkan pendidikan dibandingkan laki-laki yaitu 13,94%. Namun, pada jenjang S2/S3 lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan yang sedang/telah menempuh pendidikan yaitu 0,73%. Distribusi jenis kelamin berdasarkan jenjang pendidikan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

Tabel 9. Distribusi jenis kelamin berdasarkan jenjang pendidikan

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan																Total			
	Tidak sekolah		SD/ sederajat				SMP/ sederajat				SMA/ sederajat				D3/S1		S2/S3			
			TL		L		TL		L		TL		L		TL		L			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Perempuan	756	5,29	1.966	13,76	2.646	18,52	467	3,27	2.296	16,07	309	2,16	3.776	26,43	1.992	13,94	78	0,55	14.286	53,53
Laki-laki	386	3,11	1.566	12,63	1.965	15,85	605	4,88	1.769	14,26	377	3,04	3.920	31,61	1.722	13,89	91	0,73	12.401	46,47
Total	1.142	4,28	3.532	13,23	4.611	17,28	1.072	4,02	4.065	15,23	686	2,57	7.696	28,84	3.714	13,92	169	0,63	26.687	100

Sumber: Data diolah (2018)

Keterangan:

TL = Tidak lulus

L = Lulus

Distribusi jenjang pendidikan juga dapat dilihat dari status pernikahan. Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa jumlah individu yang menikah setelah menamatkan jenjang SMA/sederajat merupakan jumlah terbanyak yaitu 6.018 individu. Hal ini dikarenakan banyaknya pasangan muda yang telah menyelesaikan pendidikan hingga SMA/sederajat dirasa cukup tanpa perlu mengikuti pendidikan yang lebih tinggi lagi. Padahal, dengan mengikuti pendidikan tinggi, kualitas sumber daya manusia akan meningkat sehingga harapannya dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan pendapatannya juga lebih tinggi. Adanya pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya pun juga akan meningkat. Distribusi jenjang pendidikan berdasarkan status pernikahan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Distribusi status pernikahan berdasarkan jenjang pendidikan

Status Pernikahan	Jenjang Pendidikan																		Total			
	Tidak sekolah		SD/ sederajat				SMP/ sederajat				SMA/ sederajat				D3/S1		S2/S3					
			TL		L		TL		L		TL		L		TL		L					
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Blm/tdk menikah	252	4,89	573	11,11	591	11,46	164	3,18	568	11,01	148	2,87	1.678	32,54	1.148	22,26	35	0,68	5.157	19,32		
Menikah	890	4,13	2.959	13,74	4.020	18,67	908	4,22	3.497	16,24	538	2,50	6.018	27,95	2.566	11,92	134	0,62	21.530	80,68		
Total	1.142	4,28	3.532	13,23	4.611	17,28	1.072	4,02	4.065	15,23	686	2,57	7.696	28,84	3.714	13,92	169	0,63	26.687	100		

Sumber: Data diolah (2018)

Keterangan:

TL = Tidak lulus, L = Lulus

Distribusi tingkat pendidikan juga dapat dibedakan berdasarkan wilayah tempat tinggal. Wilayah tempat tinggal yang dimaksud dalam penelitian yaitu wilayah rural (desa), urban (kota) dan pulau. Perbedaan wilayah tersebut bertujuan untuk mengetahui merata atau tidaknya pendidikan di Indonesia sehingga nantinya dilakukan perbaikan pendidikan jika kondisi pendidikan Indonesia belum baik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui bantuan pendidikan maupun terkait fasilitas pendidikan.

Pada tabel 11 menunjukkan distribusi tempat tinggal (rural-urban dan pulau) berdasarkan pendidikan. Total individu di wilayah rural lebih banyak yang mengenyam pendidikan yaitu 15.831. Hal ini dikarenakan di wilayah urban pola pikir individu (majoritas) lebih maju dan sadar akan pentingnya pendidikan dibandingkan dengan individu yang tinggal di wilayah rural. Sementara itu fasilitas pendidikan di wilayah urban lebih memadai baik terutama jika dilihat dari akses (kondisi jalan dan alat transportasi yang dibutuhkan) menuju sekolah.

Di wilayah rural sebanyak 2.425 atau 22,34% hanya lulusan SD/sederajat. Hal tersebut menunjukkan jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Berbeda dengan wilayah urban, sebanyak 5.510 atau 34,81% individu menyelesaikan SMA/sederajat. Hal ini pun berlaku sama pada jenjang D3/S1/S2/S3

yang mana pada wilayah urban fasilitas lebih maju dibandingkan wilayah rural.

Tabel 11 berdasarkan data antar pulau, menunjukkan bahwa pendidikan masih terpusat di Pulau Jawa. Sebanyak 14.468 individu di Indonesia yang menempuh pendidikan berada di Pulau Jawa. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak jika dibandingkan dengan pulau lain, misalnya saja Pulau Sumatera yang hanya 6.131 individu. Tingginya jumlah individu yang menempuh pendidikan di Pulau Jawa tidak lain karena jumlah penduduknya terbanyak. Selain itu, fasilitas pendidikan maupun akses menuju sekolah yang cukup memadai menyebabkan daya tarik tersendiri bagi Individu yang tinggal di luar Pulau Jawa untuk menempuh pendidikan.

Namun untuk jumlah penduduk yang tidak bersekolah maupun yang tidak menamatkan pendidikan masih terbilang cukup banyak. Bahkan di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan masih banyak yang tidak lulus SD/sederajat dibandingkan dengan individu yang menamatkan SD/sederajat. Secara lebih rinci distribusi tingkat pendidikan berdasarkan wilayah tempat tinggal dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 11. Distribusi wilayah tempat tinggal (rural-urban dan pulau) berdasarkan jenjang pendidikan

Wilayah Tempat Tinggal	Jenjang Pendidikan																Total			
	Tidak sekolah		SD/ sederajat				SMP/ sederajat				SMA/ sederajat				D3/S1		S2/S3			
			TL		L		TL		L		TL		L							
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Rural	724	6,67	1.966	18,11	2.425	22,34	480	4,42	1.892	17,43	261	2,40	2.186	20,14	900	8,29	22	0,20	10.856	40,68
Urban	418	2,64	1.566	9,89	2.186	13,81	592	3,74	2.173	13,73	425	2,68	5.510	34,81	2.814	17,78	147	0,93	15.831	59,32
Total	1.142	4,28	3.532	13,23	4.611	17,28	1.072	4,02	4.065	15,23	686	2,57	7.696	28,84	3.714	13,92	169	0,63	26.687	100,00
Sumatera	132	2,15	930	15,17	779	12,71	380	6,20	923	15,05	250	4,08	1.866	30,44	837	13,65	34	0,55	6.131	23,02
Jawa	600	4,15	1.727	11,94	2.880	19,91	451	3,12	2.350	16,24	278	1,92	4.226	29,21	1.858	12,84	98	0,68	14.468	54,32
Bali	268	8,02	434	12,98	519	15,52	118	3,53	429	12,83	82	2,45	873	26,11	604	18,07	16	0,48	3.343	12,55
Klmntn	60	4,43	248	18,30	212	15,65	56	4,13	177	13,06	35	2,58	382	28,19	177	13,06	8	0,59	1.355	5,09
Sulawesi	82	6,15	190	14,24	219	16,42	67	5,02	178	13,34	41	3,07	319	23,91	226	16,94	12	0,90	1.334	5,01
Papua	-	0	-	0	-	0	-	0	2	100	-	0	-	0	-	0	-	0	2	0,01
Total	1.142	4,29	3.529	13,25	4.609	17,31	1.072	4,03	4.059	15,24	686	2,58	7.666	28,78	3.702	13,90	168	0,63	26.633	100

Sumber: Data diolah (2018)

Keterangan:

TL = Tidak lulus, L = Lulus

c. Kesehatan

Variabel kesehatan diukur menggunakan frekuensi sakit yang diderita oleh individu. Penyakit tersebut antara lain sakit kepala, pilek, batuk, sesak nafas, demam, sakit perut, muntah, diare (minimal 3 kali sehari), kaki bangkak, infeksi kulit, infeksi mata, sakit gigi, dan pembengkakan. Kode 1 (satu) digunakan untuk individu yang mengalami salah satu maupun beberapa penyakit selama satu bulan terakhir. Kode 0 (nol) digunakan untuk individu yang tidak mengalami sakit apapun selama 1 bulan terakhir.

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa sebanyak 22.692 atau 84,81% individu di Indonesia yang tidak sehat. Bahkan di semua rentang usia banyak individu yang tidak sehat dibandingkan individu yang sehat. Rentang usia 29 hingga 33 tahun merupakan jumlah terbanyak individu yang sakit yaitu 3.841. Urutan kedua berada pada rentang usia 34 hingga 38 tahun yaitu 3.402. Hal tersebut dapat terjadi karena di rentang usia 29 – 38 tahun selain dari sisi jumlah penduduk banyak juga faktor pola hidup yang tidak baik. Seperti banyaknya masakan siap saji yang semakin marak yang tidak baik bagi kesehatan. Distribusi rentang usia berdasarkan status kesehatan dapat dilihat pada tabel 12 berikut.

Tabel 12. Distribusi rentang usia berdasarkan status kesehatan

Rentang Usia	Sehat		Tidak sehat		Total	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
19 – 23	463	14,14	2.811	85,86	3.274	12,24
24 – 28	481	12,98	3.224	87,02	3.705	13,85
29 – 33	644	14,36	3.841	85,64	4.485	16,76
34 – 38	585	14,67	3.402	85,33	3.987	14,90
39 – 43	447	14,00	2.746	86,00	3.193	11,93
44 – 48	428	16,43	2.177	83,57	2.605	9,74
49 – 53	422	19,03	1.796	80,97	2.218	8,29
54 – 58	288	16,27	1.482	83,73	1.770	6,62
59 – 64	305	20,09	1.213	79,91	1.518	5,67
Total	4.063	15,19	22.692	84,81	26.755	100

Sumber: Data diolah (2018)

Selain penjabaran distribusi tingkat usia berdasarkan kesehatan, dapat pula diketahui distribusi jenis kelamin berdasarkan kesehatan.

Tabel 13 menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak sehat yaitu 22.692 individu atau 84,81% dan hanya 4.063 atau 15,19% yang berada pada kondisi sehat. Dari jumlah tersebut, lebih banyak perempuan yang tidak sehat dibandingkan dengan laki-laki yang tidak sehat dengan jumlah masing-masing 12.332 dan 10.360. Namun jika dilihat dari banyaknya jumlah individu yang sehat, lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan yaitu 2.074. Secara rinci distribusi jenis kelamin berdasarkan kesehatan dapat dilihat pada tabel 13 berikut.

Tabel 13. Distribusi jenis kelamin berdasarkan kesehatan

Jenis Kelamin	Sehat		Tidak sehat		Total	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Perempuan	1.989	13,89	12.332	86,11	14.321	53,53
Laki-laki	2.074	16,68	10.360	83,32	12.434	46,47
Total	4.063	15,19	22.692	84,81	26.755	100

Sumber: Data diolah (2018)

Perbedaan status kesehatan dapat pula dilihat dari lokasi tempat tinggal baik dari rural, urban dan antar pulau. Berdasarkan tabel 14 individu yang tidak sehat lebih banyak terdapat pada wilayah urban (perkotaan) yaitu 15.855, lebih banyak dari pada individu yang tinggal di wilayah rural yaitu 10.900. Hal ini dikarenakan individu yang tinggal di wilayah urban lebih banyak mengalami tekanan kehidupan/pekerjaan atau pola hidup yang tidak sehat jika dibandingkan individu yang tinggal di wilayah rural. Kejadian tersebut dapat dimungkinkan karena kurangnya fasilitas kesehatan atau sarana untuk menuju ketempat pelayanan kesehatan.

Berdasarkan antar pulau pada tabel 14, jumlah individu terbanyak yang tidak sehat terdapat di Pulau Jawa yaitu 12.191 sedangkan individu yang sehat juga terdapat di Pulau Jawa sejumlah 2.294. Hal tersebut sesuai dengan jumlah individu yang mengalami kondisi tidak sehat yang terbanyak di wilayah urban. Bahwa di Pulau Jawa banyak terdapat wilayah urban seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung dsb. Secara lebih rinci distribusi lokasi tempat tinggal (rural-urban dan antar pulau) berdasarkan status kesehatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 14 berikut.

Tabel 14 Distribusi lokasi tempat tinggal (rural-urban dan antar pulau) berdasarkan status kesehatan

Lokasi tempat tinggal	Sehat		Tidak sehat		Total	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Rural	1.943	17,83	8.957	82,17	10.900	40,74
Urban	2.120	13,37	13.735	86,63	15.855	59,26
Total	4.063	15,19	22.692	84,81	26.755	100
Sumatera	902	14,64	5.258	85,36	6.160	23,07
Jawa	2.294	15,84	12.191	84,16	14.485	54,25
Bali	534	15,96	2.812	84,04	3.346	12,53
Kalimantan	166	12,09	1.207	87,91	1.373	5,14
Sulawesi	153	11,46	1.182	88,54	1.335	5,00
Maluku & Papua	1	50,00	1	50,00	2	0,01
Total	4.050	15,17	22.651	84,83	26.701	100

Sumber: Data diolah (2018)

d. Akses Internet

Variabel akses internet mempunyai nilai minimal 0 (nol) yaitu untuk individu yang tidak bisa mengakses internet. Sementara nilai 1 (satu) digunakan untuk individu yang dapat mengakses internet.

Berdasarkan tabel 15 dapat dikatakan bahwa pada rentang usia 19 hingga 28 tahun merupakan jumlah terbanyak yang dapat mengakses internet. Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan individu dalam mengakses internet lebih baik dan dapat mengakses dibanding usia 49 tahun. Setelah usia 19 – 28 jumlah terbanyak kedua yaitu usia 24 – 28 tahun kemudian usia 29 – 33 tahun dan seterusnya hingga usia 59 – 64 tahun. Jumlah tersebut sesuai dengan kondisi perkembangan teknologi. Semakin berkembang pesatnya teknologi masyarakat dituntut untuk melek terhadap teknologi. Namun bagi usia yang semakin tua tidak sedikit yang mengalami kesulitan untuk mengikutinya. Secara lebih rinci distribusi usia berdasarkan akses internet dapat dilihat pada tabel 15 berikut.

Tabel 15. Distribusi Akses Internet Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Akses Internet				Total	
	Tidak dapat		Dapat			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
19 – 23	817	24,96	2456	75,04	3273	12,23
24 – 28	1667	44,99	2038	55,01	3705	13,85
29 – 33	2741	61,11	1744	38,89	4485	16,76
34 – 38	2808	70,45	1178	29,55	3986	14,90
39 – 43	2529	79,20	664	20,80	3193	11,94
44 – 48	2200	84,45	405	15,55	2605	9,74
49 – 53	2015	90,85	203	9,15	2218	8,29
54 – 58	1678	94,80	92	5,20	1770	6,62
59 – 64	1477	97,30	41	2,70	1518	5,67
Total	17.932	67,03	8.821	32,97	26.753	100

Sumber: Data diolah (2018)

Akses internet merupakan suatu yang penting dalam kehidupan saat ini karena dengan adanya akses internet yang baik akan memudahkan pengguna dalam memenuhi kebutuhan hidup, belajar maupun memperoleh informasi yang lain. Namun, akses internet masing-masing daerah berbeda hal ini dikarenakan banyaknya provider yang digunakan di Indonesia sehingga bandwidth akan semakin terbagi yang akan menyebabkan tiap *provider* mendapatkan sedikit bagian yang berimbang pada rendahnya kecepatan akses internet. Untuk melihat distribusi lokasi wilayah tempat tinggal berdasarkan rural-urban dan antar pulau dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16 menunjukkan bahwa jumlah individu baik yang berada di wilayah urban maupun rural lebih banyak yang tidak dapat mengakses internet dibandingkan dengan yang dapat mengakses internet. Hal ini dikarenakan belum semua wilayah di Indonesia terjangkau fasilitas akses internet. Jumlah individu yang dapat

mengakses internet paling banyak terdapat di Pulau Jawa sedangkan yang tidak dapat mengakses internet paling banyak juga terdapat di Pulau Jawa yaitu masing-masing berjumlah 5.049 dan 9.436. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan akses internet di Pulau Jawa belum maksimal. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa di Pulau Jawa merupakan pulau yang padat penduduknya, mempunyai fasilitas yang cukup memadai dibandingkan dengan pulau lain, tingkat pendidikan yang tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan di pulau lain namun, fasilitas internet belum maksimal atau 20% lebih masyarakat pada jenjang umur 49 tahun keatas tidak dapat menggunakan internet.

Di Pulau lain seperti Sumatera, Bali dan sekitarnya, Kalimantan, dan Sulawesi lebih dari dua kali lipat masyarakat tidak dapat mengakses internet dibandingkan dengan masyarakat yang dapat mengakses internet. Seperti di Pulau Sumatera yang tidak dapat mengakses internet yaitu 69,99% sedangkan sisanya yang dapat mengakses yaitu 30,01%. Di Pulau Bali, NTT dan NTB yang tidak dapat mengakses mencapai 69,61% sedangkan yang dapat mengakses yaitu 30,39%. Secara lebih rinci distribusi lokasi tempat tinggal (rural-urban dan pulau) berdasarkan akses interet dapat dilihat pada tabel 16 berikut.

Tabel 16 Distribusi lokasi tempat tinggal (rural-urban dan pulau) berdasarkan akses internet

Lokasi tempat tinggal	Akses Internet				Total	
	Tidak dapat		Dapat			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Rural	8.600	78,90	2.300	21,10	10.900	40,74
Urban	9.332	58,87	6.521	41,13	15.853	59,26
Total	17.932	67,03	8.821	32,97	26.753	100
Sumatera	4.310	69,99	1.848	30,01	6.158	23,06
Jawa	9.436	65,14	5.049	34,86	14.485	54,25
Bali	2.329	69,61	1.017	30,39	3.346	12,53
Kalimantan	920	67,01	453	32,99	1.373	5,14
Sulawesi	920	68,91	415	31,09	1.335	5,00
Maluku&Papua	2	100,00	0	0,00	2	0,01
Total	17.917	67,11	8.782	32,89	26.699	100

Sumber: Data diolah (2018)

e. Kepemilikan Kendaraan

Kendaraan merupakan alat transportasi yang digunakan untuk memudahkan segala aktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya dengan menggunakan kendaraan dapat menghemat waktu. Penelitian ini menggunakan variabel kendaraan dengan menggunakan kode 0 (nol) yaitu untuk rumah tangga yang tidak mempunyai kendaraan baik berupa motor, mobil maupun perahu. Sedangkan kode 1 (satu) digunakan untuk individu yang mempunyai salah satu maupun beberapa kendaraan.

Tabel 17 menunjukkan bahwa banyaknya kendaraan yang dimiliki oleh perempuan maupun laki-laki. Perempuan dan laki-laki yang tidak mempunyai transportasi baik motor, mobil dan kapal masing-masing hanya 3.399 dan 2.680, sedangkan yang mempunyai kendaraan masing-masing berjumlah 10.922 dan 9.754. Secara keseluruhan masyarakat Indonesia lebih banyak yang memiliki

kendaraan yaitu 20.676 atau 77,28% baik perempuan dan laki-laki dibandingkan yang tidak mempunyai yaitu 6.079 atau 22,72% baik perempuan maupun laki-laki. Distribusi jenis kelamin berdasarkan kepemilikan kendaraan secara rinci dapat dilihat pada tabel 17 berikut.

Tabel 17 Distribusi jenis kelamin berdasarkan kepemilikan kendaraan

Jenis kelamin	Kepemilikan kendaraan				Total	
	Tidak mempunyai		Mempunyai			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Perempuan	3.399	23,73	10.922	76,27	14.321	53,53
Laki-laki	2.680	21,55	9.754	78,45	12.434	46,47
Total	6.079	22,72	20.676	77,28	26.755	100

Sumber: Data diolah (2018)

Selain dilihat dari perbedaan jenis kelamin, kepemilikan kendaraan dapat dilihat dari perbedaan lokasi tempat tinggal yaitu rural-urban dan antar pulau. Kepemilikan kendaraan di Indonesia paling banyak terdapat di wilayah urban yaitu 12.836 atau sebanyak 80,96% (tabel 18). Bagi individu yang tinggal di wilayah urban kepemilikan kendaraan menjadi hal utama yang dimiliki untuk mobilitas. Tanpa adanya kendaraan, kegiatan sehari-hari tidak akan berjalan lancar dan dapat menghemat waktu. Meskipun di wilayah rural juga tetap memerlukan kendaraan untuk melakukan mobilitas yaitu sebanyak 7.840 individu atau 72,93%. Hanya saja karena banyaknya individu yang tinggal di wilayah urban sehingga kepemilikan kendaraan juga lebih banyak dimiliki oleh individu yang tinggal di wilayah urban.

Selain itu, berdasarkan tabel 18, jika dibandingkan antar pulau, Pulau Jawa merupakan pulau yang padat penduduk sehingga kepemilikan kendaraan banyak, yaitu sebesar 11.656 individu. Pulau Jawa sebagian besar merupakan wilayah urban yang mana banyak kegiatan yang memerlukan sehingga kepemilikan kendaraan merupakan suatu barang yang harus dimiliki. Distribusi lokasi tempat tinggal (rural-urban dan antar pulau) berdasarkan kepemilikan transportasi secara rinci dapat dilihat pada tabel 18 berikut.

Tabel 18. Distribusi lokasi tempat tinggal (rural-urban dan antar pulau) berdasarkan kepemilikan transportasi

Lokasi tempat tinggal	Kepemilikan transportasi				Total	
	Tidak Memiliki		Memiliki			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Rural	3.060	28,07	7.840	71,93	10.900	40,74
Urban	3.019	19,04	12.836	80,96	15.855	59,26
Total	6.079	22,72	20.676	77,28	26.755	100
Sumatera	1.673	27,16	4.487	72,84	6.160	23,07
Jawa	2.829	19,53	11.656	80,47	14.485	54,25
Bali	987	29,50	2.359	70,50	3.346	12,53
Kalimantan	249	18,14	1.124	81,86	1.373	5,14
Sulawesi	333	24,94	1.002	75,06	1.335	5,00
Maluku & Papua	0	0,00	2	100,00	2	0,01
Total	6.071	22,74	20.630	77,26	26.701	100

Sumber: Data diolah (2018)

f. Ketaatan Norma Agama

Ketaatan norma agama merupakan salah satu indikator dari modal sosial. Variabel ketaatan norma agama mempunyai nilai minimum 1 (satu) dan nilai maksimal 4 (empat). Nilai 1 (satu) yaitu bagi individu yang tidak taat terhadap norma agamanya, nilai 2 (dua) yaitu bagi individu yang terkadang taat terhadap agamanya, nilai 3

(tiga) yaitu individu yang taat terhadap agamanya sedangkan nilai maksimal 4 (empat) untuk individu yang sangat taat terhadap norma agama yang dianutnya.

Berdasarkan tabel 19 tingkat ketaatan norma agama masyarakat di Indonesia paling banyak dapat dikatakan mentaati agama yang dianut yaitu sebanyak 16.101 atau 60,28%. Jumlah paling banyak yaitu pada rentang umur 29 hingga 33 tahun yaitu 2.687 individu. Setelah itu pada rentang usia 34 – 38 tahun yaitu 2.425 individu. Distribusi rentang usia berdasarkan tingkat ketaatan agama dapat dilihat pada tabel 19 berikut.

Tabel 19. Distribusi rentang usia berdasarkan tingkat ketaatan agama

Rentang Usia (tahun)	Tingkat ketaatan agama								Total	
	1		2		3		4			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
19 – 23	114	3,49	1.002	30,63	1.783	54,51	372	11,37	3.271	12,25
24 – 28	165	4,46	1.064	28,75	2.010	54,31	462	12,48	3.701	13,86
29 – 33	149	3,33	1.073	23,97	2.687	60,02	568	12,69	4.477	16,76
34 – 38	101	2,54	805	20,21	2.425	60,88	652	16,37	3.983	14,91
39 – 43	87	2,73	573	17,97	1.935	60,70	593	18,60	3.188	11,93
44 – 48	43	1,66	402	15,48	1.637	63,03	515	19,83	2.597	9,72
49 – 53	40	1,81	271	12,24	1.418	64,05	485	21,91	2.214	8,29
54 – 58	24	1,36	193	10,91	1.171	66,20	381	21,54	1.769	6,62
59 – 64	32	2,12	116	7,67	1.035	68,45	329	21,76	1.512	5,66
Total	755	2,83	5.499	20,59	16.101	60,28	4.357	16,31	26.712	100

Sumber: Data diolah (2018)

Selain dilihat dari rentang usia, tingkat ketaatan agama juga dapat dilihat dari perbedaan jenis kelamin. Tingkat ketaatan agama pada tingkat taat yaitu lebih banyak dilakukan perempuan yaitu sebanyak 9.149 dan laki-laki sebanyak 6.953 (tabel 20). Dapat dikatakan bahwa perempuan lebih taat dalam agama dibandingkan laki-laki. Namun, untuk tingkat ketaatan agama yang sangat taat

laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu sejumlah 2.444. Dan untuk ketaatan agama yang tidak taat dan terkadang taat banyak laki-laki dibandingkan perempuan yaitu masing-masing 467 individu dan 3.071 individu. Distribusi jenis kelamin berdasarkan tingkat ketaatan agama secara rinci dapat dilihat pada tabel 20 berikut.

Tabel 20. Distribusi jenis kelamin berdasarkan tingkat ketaatan agama

Jenis Kelamin	Tingkat ketaatan agama								Total	
	1		2		3		4			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Perempuan	288	2,01	2.428	16,97	9.149	63,94	2.444	17,08	14.309	53,57
Laki-laki	467	3,76	3.071	24,76	6.953	56,05	1.913	15,42	12.404	46,43
Total	755	2,83	5.499	20,59	16.102	60,28	4.357	16,31	26.713	100

Sumber: Data diolah (2018)

Tingkat ketaatan agama juga dapat dilihat berdasarkan status pernikahan. Berdasarkan tabel 21 dapat dilihat dari status pernikahan, individu yang menikah tingkat ketaatan agama pada level taat lebih besar dibandingkan dengan individu yang belum/tidak/pernah menikah masing-masing berjumlah 13.231 individu dan 2.871 individu. Terlebih lagi pada tingkat ketaatan agama level sangat taat jauh lebih banyak yang menikah yaitu 3.619 individu sedangkan yang belum/tidak menikah berjumlah 738 individu. Distribusi status pernikahan berdasarkan tingkat ketaatan agama secara rinci dapat dilihat pada tabel 21 berikut.

Tabel 21. Distribusi status pernikahan berdasarkan tingkat ketaatan agama

Status pernikahan	Tingkat ketaatan agama								Total	
	1		2		3		4			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
B/T menikah	203	3,93	1.357	26,25	2.871	55,54	738	14,28	5.169	19,35
Menikah	552	2,56	4.142	19,23	13.231	61,41	3.619	16,80	21.544	80,65
Total	755	2,83	5.499	20,59	16.102	60,28	4.357	16,31	26.713	100

Sumber: Data diolah (2018)

g. Partisipasi kegiatan sosial

Partisipasi kegiatan merupakan salah satu indikator pada modal sosial. Variabel partisipasi kegiatan masyarakat mempunyai nilai 0 (nol) yaitu bagi individu yang tidak ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Kode 1 (satu) digunakan untuk individu yang ikut serta dalam partisipasi kegiatan masyarakat.

Tabel 22 menunjukkan distribusi partisipasi kegiatan sosial berdasarkan usia. Berdasarkan tabel 22, individu yang mengikuti partisipasi kegiatan sosial yaitu 24.275 individu atau 92,99% sedangkan yang tidak mengikuti hanya 1.831 individu atau 7,01%. Pada rentang usia 29 hingga 33 tahun merupakan jumlah terbanyak yang berpartisipasi kegiatan sosial yaitu 4.092 individu dan rentang usia 24 hingga 28 tahun sebanyak 3.360 individu. Hal tersebut terjadi karena pada rentang usia tersebut masih terdapat kemampuan dan keinginan berorganisasi. Pada usia tersebut pula kemampuan untuk terjun di masyarakat, menggerakkan orang lain dan energi yang dimiliki masih banyak. Distribusi usia berdasarkan partisipasi

kegiatan masyarakat secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 22 berikut.

Tabel 22. Distribusi usia berdasarkan partisipasi kegiatan masyarakat

Rentang Usia	Partisipasi Kegiatan Sosial				Total	
	Mengikuti		Tidak Mengikuti			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
19 – 23	2.996	95,32	147	4,68	3.143	12,04
24 – 28	3.360	93,41	237	6,59	3.597	13,78
29 – 33	4.092	93,57	281	6,43	4.373	16,75
34 – 38	3622	93,06	270	6,94	3.892	14,91
39 – 43	2897	92,20	245	7,80	3.142	12,04
44 – 48	2360	92,04	204	7,96	2.564	9,82
49 – 53	2009	92,20	170	7,80	2.179	8,35
54 – 58	1582	91,50	147	8,50	1.729	6,62
59 – 64	1357	91,26	130	8,74	1.487	5,70
Total	24.275	92,99	1.831	7,01	26.106	100

Sumber: Data diolah (2018)

Jika dilihat dari perbedaan jenis kelamin, partisipasi kegiatan sosial antara perempuan dan laki-laki dapat dikatakan hampir sama. Berdasarkan tabel 23 keikutsertaan dalam berpartisipasi kegiatan sosial perempuan dan laki-laki masing-masing 13.621 dan 10.654. Hal tersebut menunjukkan antara perempuan dan laki-laki hampir sama mempunyai jiwa berorganisasi dan mengikuti kegiatan sosial yang tinggi. Dengan mengikuti partisipasi kegiatan sosial dapat menambah relasi, pengetahuan, meningkatkan jiwa sosial, dan pengalaman yang nantinya akan lebih berguna di masa depan. Distribusi jenis kelamin berdasarkan partisipasi kegiatan masyarakat secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 23 berikut.

Tabel 23. Distribusi jenis kelamin berdasarkan partisipasi kegiatan masyarakat

Jenis kelamin	Partisipasi Kegiatan Masyarakat				Total	
	Mengikuti		Tidak Mengikuti			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Perempuan	13.621	96,84	445	3,16	14.066	53,88
Laki-laki	10.654	88,49	1.386	11,51	12.040	46,12
Total	24.275	92,99	1.831	7,01	26.106	100

Sumber: Data diolah (2018)

Partisipasi kegiatan masyarakat juga dapat dibedakan berdasarkan lokasi tempat tinggal baik berupa rural-urban maupun antar pulau di Indonesia. Dilihat dari perbedaan lokasi tempat tinggal, lebih banyak individu yang mengikuti partisipasi kegiatan sosial dari pada yang tidak mengikuti yaitu sejumlah 24.275 individu atau 92,99% (tabel 24). Namun, di wilayah urban jumlah individu yang berpartisipasi kegiatan sosial sejumlah 14.471 individu atau 93,75% sedangkan yang tidak mengikuti partisipasi kegiatan masyarakat yaitu 964 atau 6,25%. Di wilayah rural individu yang mengikuti partisipasi kegiatan masyarakat 9.804 atau 91,88% sedangkan yang tidak mengikuti yaitu 867 atau 8,12%. Jika dilihat dari presentase jumlah individu yang mengikuti partispasi kegiatan masyarakat di wilayah urban lebih banyak dibandingkan individu yang mengikuti partisipasi kegiatan masyarkat di wilayah rural yaitu masing-masing sebesar 93,75% dan 91,88%. Distribusi lokasi tempat tinggal (rural-urban dan antar pulau) berdasarkan partisipasi kegiatan masyarakat secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 24 berikut.

Tabel 24. Distribusi lokasi tempat tinggal (rural-urban dan antar pulau) berdasarkan partisipasi kegiatan masyarakat

Lokasi tempat tinggal	Partisipasi kegiatan masyarakat				Total	
	Mengikuti		Tidak Mengikuti			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Rural	9.804	91,88	867	8,12	10.671	40,88
Urban	14.471	93,75	964	6,25	15.435	59,12
Total	24.275	92,99	1.831	7,01	26.106	100
Sumatera	5.411	90,82	547	9,18	5.958	22,87
Jawa	13.498	94,68	759	5,32	14.257	54,72
Bali	2.962	90,66	305	9,34	3.267	12,54
Kalimantan	1224	91,69	111	8,31	1.335	5,12
Sulawesi	1130	91,57	104	8,43	1.234	4,74
Maluku & Papua	2	100,00	0	0,00	2	0,01
Total	24.227	92,99	1.826	7,01	26.053	100,00

Sumber: Data diolah (2018)

Pada tabel 24 juga dapat dilihat bahwa berdasarkan lokasi tempat tinggal lebih dari 90% disemua pulau di Indonesia mengikuti partisipasi kegiatan masyarakat. Data pada tabel 24 menunjukkan bahwa individu yang berpindah tinggal di Maluku dan Papua 100% mengikuti partisipasi kegiatan masyarakat. Hal ini terjadi karena ketika pengambilan data IFLS pada periode sebelumnya individu tersebut masih masuk ke dalam wilayah pencacahan IFLS. Namun karena suatu hal kedua individu tersebut berpindah ke Maluku dan Papua dan tetap menjadi responden.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model regresi yang baik dan benar-benar memiliki ketepatan dalam estimasi maka diperlukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik juga diperlukan untuk memenuhi kriteria BLUE. Hasil analisis uji asumsi klasik yaitu:

a. Random sampling

Pengambilan data sampel telah dilakukan secara random oleh lembaga SurveyMeter. Data diambil secara random dari 24 provinsi yang tersebar di wilayah Indonesia yang tersebar di +4.600 desa dengan jumlah rumah tangga +15.000 dan individu +50.000 dengan jumlah sampel 26.755 individu.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan skewness-kurtosis karena sampel yang digunakan yaitu 26.755 individu sehingga merupakan pilihan terbaik (Hidayat, 2014). Selain itu uji skewness-kurtosis merupakan uji dengan sampel yang tak terhingga yang dapat dilakukan pada software STATA.

Tabel 25. Hasil Uji Normalitas

Jumlah Observasi	26.755
Skewness	0,000
Kurtosis	0,000
Prov>chi ²	0,000

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 25 terdapat nilai skewness dan kurtosis sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa secara grafis data tidak berdistribusi normal. Selain itu nilai prob>chi² sebesar 0,000 yang berarti jika nilai Prob>chi² < 0,05 menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Data yang tidak normal menunjukkan data ekstrim dalam satu set data yang akan menghasilkan distribusi data tidak normal. Hal tersebut dapat diketahui bahwa adanya penggunaan variabel dummy untuk variabel

kesehatan, kepemilikan kendaraan dan partisipasi kegiatan masyarakat. Selain itu pada variabel pendidikan menggunakan kode disetiap jenjang pendidikan, yaitu 1 – 22. Variabel akses internet dan ketaatan norma agama menggunakan ukuran likert (1-4) sedangkan variabel pendapatan untuk menunjukkan kemiskinan menggunakan skala 1 – 4 sehingga menyebabkan jenis data tidak sama (adanya data ekstrim) yang menyebabkan data menjadi tidak normal.

Ketidaknormalan data disebkan karena adanya data outlier sehingga dengan menggunakan metode robust secara otomatis dapat menolak pengaruh ketidaknormalan pada signifikansi (Paremans et al, 2018). Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka menggunakan *robust statistic*. *Robust statistic* berkenaan dengan pengembangan prosedur statistik yang tidak mudah terganggu oleh penyimpangan kecil pada asumsi yang mendasarinya, misalnya *outlier* (Alsa, 2001: 22). Oleh karena itu penggunaan *robust statistic* dalam estimasi dapat menunjukkan bahwa data tidak mudah terganggu oleh penyimpangan kecil pada asumsi yang mendasarinya.

c. Uji Multikolinearitas

Tabel 26. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
Pendidikan	1,44
Kesehatan	1,01
Akses Internet	1,42
Kepemilikan kendaraan	1,04
Ketaatan norma agama	1,02
Partisipasi kegiatan sosial	1,01

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 26 dapat diketahui bahwa nilai VIF kurang dari 4 sehingga tidak terdapat hubungan antara variabel bebas. Hal tersebut mengacu pada Garson (2012: 45) jika nilai VIF kurang dari 4,0 maka tidak terjadi multikolinearitas atau beberapa peneliti menggunakan nilai VIF lebih dari lima maka terjadi multikolinearitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yang digunakan yaitu Breuch-Pagan test dan White's test. Breuch-Pagan test mempu mendekripsi heteroskedastisitas yang bersifat linier sedangkan white's test mampu mendekripsi heteroskedastisitas dalam bentuk yang lebih kompleks (Yappy, 2013).

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 27 diperoleh nilai Prob>chi² sebesar 0,000 pada kedua metode pengujian heteroskedastisitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut menggunakan koreksi, yang berupa metode robust sehingga diasumsikan permasalahan terkait ketidakterpenuhinya homoskedastisitas dapat diatasi (Yappy, 2013). Namun penelitian ini menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey test karena uji ini lebih kuat dibandingkan dengan uji-uji yang lain (Garson, 2012: 41). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 27 berikut.

Tabel 27. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Jenis test	Prob>chi2
Breusch-Pagan test	0,000
White's test	0,000

Sumber: data diolah (2018)

e. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji hubungan antara error satu observasi dengan error observasi yang lainnya. Dalam metode penelitian telah disebutkan bahwa uji autokorelasi biasanya hanya terjadi pada data time series (Garson, 2012). Yappy (2013: 26) juga menyatakan bahwa autokorelasi umumnya lebih umum terjadi pada data time series, di mana terjadi antara error suatu periode (ε_t) dengan error periode lainnya ($\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t2}, \dots$). Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak dilakukan uji autokorelasi karena data yang digunakan *cross-section*.

3. Analisis Hasil Uji Asumsi Klasik

Dari beberapa uji asumsi klasik yang tidak terpenuhi sehingga untuk menghasilkan model yang sesuai yaitu dengan menggunakan metode *robust* (ketegaran). *Robustness* (ketegaran) memiliki arti ketidakpekaan/ketidaksensitifan terhadap penyimpangan-penyimpangan kecil dari asumsi (Alsa, 2001: 22).

4. Hasil Uji Hipotesis

Hasil estimasi menggunakan STATA 14.0 pada tabel 28 menunjukkan bahwa secara parsial lima variabel bebas, yaitu pendidikan, kesehatan, akses internet, partisipasi kegiatan masyarakat dan kepemilikan kendaraan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan dengan nilai signifikansi 1% dan 5%. Namun, variabel ketaatan norma beragama mempunyai nilai signifikansi diatas 5% yaitu 0,873 sehingga tidak berpengaruh secara signifikan.

Tabel 28. Hasil Estimasi Data

Variabel	Kemiskinan	
	Coef.	P > t
Pendidikan	-0,0385	0,000 ***
Kesehatan	-0,0026	0,001 ***
Akses Internet	-0,2132	0,000 ***
Kepemilikan Kendaraan	-0,1622	0,000 ***
Ketaatan norma agama	0,0285	0,873
Partisipasi kegiatan masyarakat	-0,2336	0,000 ***
Prob > F		0,000 ***
R-square		0,0704

* $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$

Sumber: data diolah

Tabel 28 menunjukkan bahwa model yang terbentuk *robust*. Sehingga yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil *robust* tersebut. Berikut akan dijelaskan hasil pengujian hipotesis penelitian berdasarkan tabel 28.

a. Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan tabel 28 menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

kemiskinan (menerima H_1) dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 pada $\alpha = 1\%$ dengan nilai koefisiensi sebesar -0,0385. Yang berarti bahwa ketika pendidikan meningkat sebanyak 1% maka kemiskinan berkurang sebesar 0,0385 atau 3,85%. Kenaikan pendidikan yang dimaksud yaitu semakin banyak individu yang lulus atau menyelesaikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.

b. Pengaruh Kesehatan terhadap Kemiskinan

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan tabel 28 menunjukkan bahwa variabel kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (menerima H_1) dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 pada $\alpha = 5\%$ dengan nilai koefisiensi sebesar -0,0026. Yang berarti bahwa ketika kesehatan meningkat sebanyak 1% maka kemiskinan berkurang sebesar 0,0026 atau 0,2%. Kesehatan diukur dengan frekuensi sakit yang diderita individu. Semakin sering sakit maka kesejahteraan akan menurun.

c. Pengaruh Akses Internet terhadap Kemiskinan

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa akses internet berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan tabel 28 menunjukkan bahwa variabel akses internet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (menerima H_1) dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 pada $\alpha = 1\%$ dengan nilai koefisiensi sebesar -0,2132. Yang berarti bahwa ketika internet meningkat

sebanyak 1% kemiskinan berkurang sebesar 0,2132 atau 21,32%.

Kenaikan internet yang dimaksud yaitu semakin banyak individu yang dapat menggunakan internet baik akses ataupun penggunaannya.

d. Pengaruh Kepemilikan Kendaraan terhadap Kemiskinan

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa kepemilikan kendaraan berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan tabel 28 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan kendaraan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (menerima H_1) dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 pada $\alpha = 1\%$ dengan nilai koefisiensi sebesar -0,1622. Yang berarti bahwa ketika kepemilikan kendaraan meningkat sebanyak 1% maka kemiskinan akan berkurang sebesar 0,1622 atau 16,22%. Kenaikan kepemilikan kendaraan yang dimaksud yaitu semakin banyak individu yang memiliki minimal salah satu kendaraan baik berupa motor, mobil atau kapal untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

e. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Agama terhadap Kemiskinan

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa tingkat kepercayaan agama berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan tabel 28 menunjukkan bahwa variabel tingkat kepercayaan agama tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (menolak H_1) dengan nilai signifikansi sebesar 0.873. Yang berarti bahwa setiap seseorang terhadap agamanya tidak dapat meningkatkan atau

menurunkan kemiskinan. Hal tersebut dapat terjadi karena ketaatan agama masing-masing individu merupakan hubungan antara Tuhan-Nya.

f. Pengaruh Partisipasi Kegiatan Masyarakat terhadap Kemiskinan

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa partisipasi kegiatan masyarakat berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan tabel 28 menunjukkan bahwa variabel partisipasi kegiatan masyarakat berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (menerima H_1) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 pada $\alpha = 1\%$ dengan nilai koefisiensi sebesar -0,2336. Yang berarti bahwa ketika keikutsertaan partisipasi kegiatan meningkat sebanyak 1% maka kemiskinan akan berkurang sebesar 0,2336 atau 23,36%. Keikutsertaan individu dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan pendapatan karena melalui aktivitas tersebut biasanya ada aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan anggotanya.

B. Pembahasan

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang dilihat dari aspek pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia

Usaha peningkatan kemiskinan dapat dilakukan melalui pendidikan. Sebagaimana dengan usaha yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka peningkatan pendidikan. Salah satunya dengan tetap

konsisten pada pembagian anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 4. Usaha lain yang telah dilakukan dengan peluncuran Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi masyarakat miskin supaya dapat mengenyam pendidikan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pendapatan yang akan diterima. Pendidikan yang tinggi menjadikan kualitas sumber daya tinggi sehingga produktivitas meningkat. Peningkatan produktivitas mengakibatkan peningkatan pendapatan. Semakin tingginya pendapatan kemungkinan dapat mengurangi kemiskinan karena pendapatan masyarakat berada di atas garis kemiskinan menurut BPS atau menurut *World Bank*. Hal ini sesuai dengan teori Sharp et al (1996) bahwa pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan.

Penelitian lain yang menukung hasil tersebut yaitu Sidu (2006) menyebutkan bahwa pendidikan sebagai modal manusia dapat meningkatkan kemampuan individu dalam rangka menjadikan individu yang lebih baik dari sisi pendapatan. Selain itu Widjajanti (2012: 3) menyatakan bahwa peningkatan modal manusia dapat ditempuh dengan cara meningkatkan pendidikan. Romer (1990: 79) juga menyatakan bahwa modal manusia dapat diukur dengan jelas dari aktivitas efek kumulatif dari pendidikan formal dan keterampilan.

Weiping (2018: 7) juga mengatakan bahwa strategi target pengurangan kemiskinan di Negara China dapat dilakukan dengan cara

mengeluarkan *five-batch policy*. China yang telah berhasil mengurangi angka kemiskinan dari tahun 1981 hingga 2013. Selama tiga puluh dua tahun tersebut kemiskinan di China turun drastis dari yang awalnya 88% orang hidup dibawah garis kemiskinan-batas garis kemiskinan 1,9 dollars-menjadi 1,85% atau sebanyak 850 juta jiwa terbebas dari kemiskinan (Weiping, 2018: 3).

Romer (1990: 79) juga berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari banyaknya tingkat pendidikan formal yang ditempuh lebih banyak dibandingkan non formal. Tabel 29 menunjukkan bahwa banyak individu yang telah menyelesaikan pendidikan formal. Individu paling banyak yaitu individu yang menyelesaikan jenjang SMA/sederajat pada kelas 12. Sehingga dengan banyaknya jumlah individu yang menyelesaikan sekolah pada jenjang SMA/sederajat maka dapat meningkatkan pendapatan karena pada jenjang SMA/sederajat akan lebih siap bekerja untuk menghasilkan produktivitas tinggi atau dengan usia lulusan SMA/Sederajat merupakan bagian usia produktif untuk bekerja. Secara lebih rinci deskripsi jumlah individu pada tingkat pendidikan yang diselesaikan individu dapat dilihat pada tabel 29 berikut.

Tabel 29. Deskripsi Jumlah Individu pada Tingkat Pendidikan yang Diselesaikan Individu

pendidikan	Freq.	Percent	Cum.
Pendidikan nonformal	1,142	4.28	4.28
SD/sederajat(1)	547	2.05	6.33
SD/sederajat(2)	772	2.89	9.22
SD/sederajat(3)	753	2.82	12.04
SD/sederajat(4)	821	3.08	15.12
SD/sederajat(5)	639	2.39	17.51
SD/sederajat(6)	4,611	17.28	34.79
SMP/Sederajat(7)	587	2.20	36.99
SMP/Sederajat(8)	485	1.82	38.81
SMP/Sederajat(9)	4,065	15.23	54.04
SMA/Sederajat(10)	371	1.39	55.43
SMA/Sederajat(11)	315	1.18	56.61
SMA/Sederajat(12)	7,696	28.84	85.45
D1/D2/D3/S1(13)	288	1.08	86.53
D1/D2/D3/S1(14)	298	1.12	87.65
D1/D2/D3/S1(15)	1,099	4.12	91.76
D1/D2/D3/S1(16)	2,029	7.60	99.37
S2(17)	24	0.09	99.46
S2(18)	140	0.52	99.98
S3(19)	2	0.01	99.99
S3(20)	0	0.00	99.99
S3(21)	0	0.00	99.99
S3(22)	3	0.01	100.00
Total	26,687	100.00	

Sumber: Hasil Analisis (diolah)

Mendukung temuan Njong (2010: 7) bahwa pendidikan dapat membantu pengurangan kesempatan individu menjadi miskin di Negara Kamerun. Lebih lanjut, Njong (2010: 7) mengatakan bahwa melalui pencapaian pendidikan yang lebih tinggi akan membantu meningkatkan pendapatan potensial individu. Kenaikan pendapatan tersebut dapat membantu individu keluar dari kemiskinan. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai individu maka dapat dikatakan akan semakin lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Selain itu, Awan et al (2011: 1), menyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor yang penting dalam rangka mengurangi kemiskinan. Kehadiran pendidikan dapat meningkatkan potensi pendapatan. Kenaikan pendapatan akan membantu untuk keluar dari jerat kemiskinan. Tingkat pendidikan yang tinggi lebih efektif dalam pengurangan kemiskinan. Tabel 29 juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ditempuh sebagian masyarakat Indonesia berada pada jenjang SMA/K/sederajat yaitu 28,84% sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi hanya 14,65%. Hal tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan individu yang menyelesaikan pada jenjang SMA/K/sederajat atau hanya setengah dari individu yang menyelesaikan jenjang SMA/K/sederajat.

Jurnal yang mendukung penelitian ini yaitu Yusuf (2014) yang menyatakan bahwa investasi pada modal manusia salah satunya di bidang pendidikan, mempunyai dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikator dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, penelitian ini merupakan saran lanjutan yaitu dengan memasukkan pendidikan tinggi sehingga pendidikan dapat dianalisis dengan data lengkap di setiap jenjangnya.

Permana (2012: 6) juga menyatakan bahwa variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan mengurangi

kemiskinan. Penelitian tersebut mendukung penelitian ini bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

2. Pengaruh Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia

Kesehatan dapat mempengaruhi kemiskinan yang diperaksikan dengan besarnya pendapatan yang diterima setiap individu. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 30 dengan nilai signifikansi 5% bahwa kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Kesehatan diukur dari frekuensi jumlah sakit yang dialami oleh individu. Semakin sering individu sakit atau tidak sehat mengakibatkan bertambahnya kemiskinan. Begitu juga sebaliknya jika frekuensi individu sakit berkurang atau sehat maka individu tersebut dapat menurunkan kemiskinan. Karena dengan kondisi badan yang sehat produktivitas akan meningkat sehingga pendapatan meningkat yang pada akhirnya kemungkinan kemiskinan akan berkurang.

Tabel 30 menunjukkan frekuensi sakit individu terhadap penyakit yang diderita. Nilai 0 (nol) menunjukkan jumlah individu yang sehat sebanyak 4.063 individu. Nilai 1 (satu) menunjukkan jumlah individu yang pernah mengalami frekuensi sakit sebanyak 22.692 individu. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak yang mengalami/merasakan sakit. Tabulasi data kesehatan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 30 berikut.

Tabel 30. Tabulasi Data Kesehatan

Kesehatan		Freq.	Percent	Cum.
Sehat (0)		4,063	15.19	15.19
Tidak (1)		22,692	84.81	100.00
Total		26,755	100.00	

Sumber: Data diolah

Individu yang sehat akan lebih produktif karena produktivitas mempengaruhi jumlah pendapatan individu yang semakin meningkat. Meningkatnya pendidikan mempengaruhi tingkat pendapatan individu tersebut. Hal tersebut sesuai dengan jurnal Sidu (2006) bahwa modal manusia yaitu salah satunya adalah kesehatan dapat mempengaruhi proses pemberdayaan. Yang mana proses pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Widjajanti (2011) bahwa tingkat kesehatan mempengaruhi pemberdayaan. Individu yang sehat dapat diberdayakan sehingga akan mempengaruhi produktivitas yang nantinya berpengaruh pada meningkatnya pendapatan. Pendapatan yang meningkat dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengurangi kemiskinan.

Permana (2012: 6) juga menyatakan bahwa variabel kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Yang berarti bahwa semakin tinggi derajat kesehatan maka akan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa salah satu tolok

ukur kemiskinan sapat dilihat dari aspek pendapatan. Sehingga ketika kesehatan meningkat maka kemiskinan akan berkurang.

3. Pengaruh Akses Internet terhadap Kemiskinan di Indonesia

Kebutuhan akan informasi pada era digital saat ini memang diperlukan. Adanya akses internet memadai akan memudahkan individu mengakses segala kebutuhan yang ada. Terlebih jika penggunaan internet digunakan sebagai mestinya.

Tabel 31 menunjukkan jumlah individu yang dapat mengakses internet. Nilai 0 (nol) menunjukkan bahwa individu tidak dapat mengakses internet. Nilai 1 (satu) menunjukkan bahwa individu dapat mengakses internet. Individu yang dapat mengakses internet sebanyak 8.821 individu sedangkan yang tidak dapat mengakses internet sebanyak 17.932 individu. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa individu yang dapat mengakses internet lebih sedikit dibandingkan dengan individu yang tidak dapat mengakses internet. Hal tersebut menunjukkan akses internet di Indonesia belum semuanya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tabulasi data akses internet secara rinci dapat dilihat pada tabel 31 berikut.

Tabel 31. Tabulasi Data Akses Internet

internet		Freq.	Percent	Cum.
(tidak)	0	17,932	67.03	67.03
(dapat)	1	8,821	32.97	100.00
Total		26,753	100.00	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa akses internet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi sebesar 1%. Internet termasuk kedalam teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat. Teknologi termasuk kedalam aspek modal fisik dalam proses pemberdayaan (Sidu, 2006). Dengan mengakses internet individu dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan keberdayaan individu itu sendiri. Peningkatan keberdayaan tersebut berakibat pada pengurangan jumlah individu yang miskin.

4. Pengaruh Kepemilikan Kendaraan terhadap Kemiskinan di Indonesia

Kendaraan juga termasuk kedalam teknologi yang bertujuan untuk mempermudahkan manusia dalam berpindah tempat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan taraf signifikansi sebesar 1%. Kepemilikan kendaraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepemilikan motor/mobil/kapal pada rumah tangga.

Tabel 32 menunjukkan tabulasi data kepemilikan kendaraan. Nilai 0 (nol) menunjukkan bahwa rumah tangga tidak mempunyai salah satu dari kendaraan tersebut. Nilai 1 (satu) menunjukkan bahwa rumah tangga mempunyai salah satu atau beberapa alat transportasi lain yang dimaksud. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kepemilikan kendaraan di Indonesia lebih banyak dari pada rumah tangga yang sama

sekali tidak mempunyai kendaraan yaitu berjumlah 20.676. Tabulasi data kepemilikan kendaraan secara rinci dapat dilihat pada tabel 32 berikut.

Tabel 32. Tabulasi Data Kepemilikan Kendaraan

vehicle	Freq.	Percent	Cum.
0	6,079	22.72	22.72
1	20,676	77.28	100.00
Total	26,755	100.00	

Sumber: Data diolah

Dengan adanya kendaraan yang memadai, akan memudahkan akses individu ke segala tempat yang diinginkan. Misalkan saja jika ingin ke pasar yang jaraknya jauh dari rumah akan lebih efisien jika menggunakan kendaraan. Sementara itu bagi pekerja akan lebih memakan sedikit waktu sehingga pendapatan yang diperoleh semakin meningkat sehingga kemiskinan dapat berkurang.

Sesuai dengan teori lingkaran setan kemiskinan (Nurkse, 1953) bahwa investasi (kendaraan salah satunya) akan mempengaruhi jumlah modal. Yang mana modal tersebut akan berpengaruh pada ketidaksempurnaan pasar dan keterbelakangan. Oleh karena itu terbukti bahwa kendaraan dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan individu pada peningkatan pendapatan yang berimbang pada pengurangan kemiskinan.

5. Pengaruh Ketaatan Norma Agama terhadap Kemiskinan di Indonesia

Tingkat kepercayaan agama tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Ukuran tingkat kepercayaan agama bukan terkait dengan agama yang dianut, melainkan seberapa taat individu terhadap agama yang dianutnya.

Namun, seberapa taat individu terhadap agamanya tidak berpengaruh dengan kemiskinan melainkan berkaitan dengan Tuhannya (aktivitas kerohanian).

Tabel 33 menunjukkan tabulasi data tingkat kepercayaan agama. Tingkat kepercayaan agama dalam penelitian ini diukur dengan seberapa taat individu terhadap agama yang dianut. Nilai 0 (nol) menunjukkan bahwa individu tidak taat terhadap agama yang dianut. Nilai 1 (satu) menunjukkan bahwa individu taat beribadah dalam agama yang dianut. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat ketiaatan agama yang dianut individu pada tingkat taat di Indonesia yaitu sejumlah 16.102 individu sedangkan individu yang tidak taat terhadap agama yang dianut sejumlah 755. Sehingga hal tersebut menandakan masyarakat individu lebih banyak yang taat terhadap agamanya dibandingkan yang tidak taat. Tabulasi data tingkat kepercayaan agama secara rinci dapat dilihat pada tabel 33 berikut.

Tabel 33. Tabulasi Data Ketaatan Norma Agama

Ket nor agm	Freq.	Percent	Cum.
1	755	2.83	2.83
2	5,499	20.59	23.41
3	16,102	60.28	83.69
4	4,357	16.31	100.00
Total	26,713	100.00	

Sumber: Data diolah

Hal tersebut tidak sejalan dengan Sidu (2013) bahwa salah satu faktor modal sosial, kepatuhan terhadap norma (agama), berpengaruh nyata dengan perbaikan proses pemberdayaan menuju pengurangan

kemiskinan. Ketidakberhasilan proses pemberdayaan warga masyarakat sekitar kawasan Hutan Lindung Jompi terkait dengan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama. Namun, berdasarkan penelitian ini bahwa ketiaatan norma agama tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang digunakan sebagai proksi kemiskinan.

6. Pengaruh Partisipasi Kegiatan Masyarakat terhadap Kemiskinan di Indonesia

Partisipasi kegiatan masyarakat berpengaruh negatif dengan taraf signifikansi 1% terhadap kemiskinan. Ketika individu semakin aktif dalam keikutsertaan organisasi dalam masyarakat maka kemiskinan akan berkurang. Ukuran partisipasi kegiatan masyarakat yaitu seberapa sering/banyak individu ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat tersebut meliputi rapat, ikut serta dalam anggota koperasi, sukarelawan, kerja bakti, karang taruna, aktivitas keagaman dsb.

Tabel 34 menunjukkan tabulasi data partisipasi kegiatan masyarakat. Partisipasi kegiatan masyarakat dalam penelitian ini diukur dengan seberapa sering individu mengikuti kegiatan sosial di masyarakat. Nilai 0 (nol) menunjukkan bahwa individu tidak mengikuti partisipasi kegiatan di masyarakat. Nilai 1 (satu) menunjukkan bahwa individu mengikuti partisipasi kegiatan masyarakat. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa individu yang mengikuti partisipasi kegiatan masyarakat di Indonesia lebih banyak yaitu 24.275 individu dibandingkan dengan yang tidak

berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat yaitu 1.831 individu. Tabulasi data partisipasi kegiatan masyarakat secara rinci dapat dilihat pada tabel 34 berikut.

partisipasi	Freq.	Percent	Cum.
0	24,275	92.99	92.99
1	1,831	7.01	100.00
Total	26,106	100.00	

Sumber: Data diolah

Hal tersebut sejalan dengan Kesi (2011) yang menyatakan bahwa salah satu indikator sosial, jaringan sosial, meningkatkan keinginan untuk memperkuat budaya dalam meningkatkan keinginan untuk menambah tali persaudaraan yang mengarah pada tujuan bersama untuk kesejahteraan di Desa Sumber Rahayu. Oleh karena itu melalui partisipasi kegiatan masyarakat mengakibatkan kemiskinan berkurang.

7. Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Akses Internet, Kepemilikan Kendaraan, Ketaatan Norma Agama dan Partisipasi Kegiatan Masyarakat terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi data pada tabel 28 dapat diketahui bahwa secara simultan keenam variabel yaitu pendidikan, kesehatan, akses internet, kepemilikan kendaraan, ketaatan norma agama dan partisipasi kegiatan masyarakat berpengaruh secara signifikan dengan nilai Prob>F sebesar 0,000 terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil tersebut mendukung temuan Sidu (2006) yang juga menyatakan bahwa modal manusia yang di dalamnya terdapat variabel pendidikan dan kesehatan, modal fisik yang di dalamnya terdapat variabel akses internet dan

kepemilikan kendaraan dan modal sosial yang di dalamnya terdapat variabel ketaatan norma agama dan partisipasi kegiatan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap pemberdayaan yang mana melalui masyarakat yang berdaya akan meningkatkan pendapatan sehingga kemiskinan dapat berkurang.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan penelitian yaitu:

1. Data kepemilikan kendaraan hanya menggunakan kepemilikan motor, mobil dan kapal sedangkan sepeda meskipun tidak digerakkan dengan mesin juga termasuk kendaraan yang mana kemungkinan juga dimiliki oleh individu.
2. Tidak menggunakan data fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan sebagai variabel penunjang pendidikan dan kesehatan karena fasilitas termasuk kedalam fasilitas daerah sehingga sulit digeneralisasikan ke dalam individu dan tidak semua individu berada pada fasilitas yang sama di setiap daerahnya.
3. Tidak melihat jumlah individu/jumlah anak/jumlah tanggungan dalam suatu keluarga yang nantinya akan berpengaruh terhadap pengeluaran individu yang juga berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh sebagai variabel terikat.